KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Ketenagakerjaan, Komisi IX bahas anak hasil kawin campur
Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Ketenagakerjaan

Komisi IX Bahas Anak Hasil Kawin Campur

ANGGOTA Komisi IX DPR Achmad Ru'yat menyoroti ketidaksinkronan UU Keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan soal keluarga perkawinan campuran di Indonesia. Perbedaan itu dinilai berdampak pada status pasangan dan anak WNI, serta keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dia menyebut, UU 6/2011 tentang Keimigrasian sejatinya memberikan ruang pasangan WNI dalam keluarga perkawinan campuran untuk hidup, bekerja, dan beraktualisasi di Indonesia. Namun, pada praktiknya ada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memperlakukan pasangan perkawinan campuran sebagai tenaga kerja asing (TKA).

"Kondisi itu memunculkan disharmoni antarregulasi yang berujung pada ketidakpastian hukum," kata Ru'yat dalam RDPU Komisi IX dengan Pengurus Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) serta Aliansi Perkawinan Antar Bangsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ru'yat menegaskan, keluarga perkawinan campuran seharusnya dipandang sebagai institusi keluarga, bukan semata-mata sebagai relasi ketenagakerjaan. Perlakuan hukum yang tidak tepat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat pemenuhan kesejahteraan keluarga WNI.

Karena itu, pihaknya mendorong agar persoalan itu dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah dalam pembahasan perubahan ketiga UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan ke depan lebih sinkron, adaptif, dan berkeadilan.

Menurutnya, penyesuaian regulasi ketenagakerjaan juga perlu mempertimbangkan dinamika global, tantangan ekonomi, serta kebutuhan dunia kerja nasional. Dengan demikian, UU yang dibahas tidak hanya responsif terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga mampu menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.

"Regulasi harus betul-betul aplikatif dan menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persaingan global serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata politikus PKS itu.


FRAKSIPKS ID

Achmad Ru'yat

Komisi IX, sambungnya, berkomitmen terus membuka ruang meaningful participation dalam pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan sangat krusial agar kebijakan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

"Kami siap mendengar pandangan masyarakat, termasuk dari serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil, agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menambahkan, fenomena perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang kian meningkat seiring perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Realitas sosial itu membuat revisi UU Ketenagakerjaan jadi semakin relevan dan mendesak.

Charles menilai, dunia yang kian tanpa batas telah mengubah cara orang bertemu dan membangun keluarga. Perkembangan teknologi telah membuat proses mencari pasangan tidak lagi dibatasi ruang geografis. Karena itu, situasi keluarga perkawinan campuran di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang.

Legislator Fraksi PDIP itu mengatakan, dinamika tersebut harus jadi dasar pemikiran Komisi IX dalam membahas revisi UU Ketenagakerjaan. Karena setiap aturan dibuat untuk memberikan manfaat dan perlindungan, khususnya bagi WNI. "Bicara soal aturan, pasti ada manfaatnya. Kita ingin melindungi WNI agar bisa mendapatkan pekerjaan secara layak," katanya.

Dia menilai, dalam konteks perkawinan campuran, ada manfaat lain yang juga perlu dipertimbangkan secara adil. Karena itu, regulasi ketenagakerjaan perlu dirancang agar tidak menimbulkan diskriminasi terselubung terhadap keluarga WNI.

Dia memastikan seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam RDPU telah dicatat. Berikutnya, pihaknya juga akan mempelajari praktik terbaik dari negara lain sebagai bahan perbandingan. "Kami akan mempelajari *best practice* di negara lain agar keluarga perkawinan campuran di Indonesia bisa bekerja dan menafkahi keluarganya," tutupnya. ■ PYB